

kesehatan kepada masyarakat melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) .^{6,9}

Pada tahun 2007 Menteri Kesehatan mencanangkan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dengan stiker yang merupakan "upaya terobosan" dalam percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir melalui kegiatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan, yang sekaligus merupakan kegiatan yang membangun potensi masyarakat, khususnya kepedulian masyarakat untuk persiapan dan tindak dalam menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir.^{6,9}

Dasar hukum dalam pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yakni : surat edaran Menteri Kesehatan No.295 tahun 2008 tentang percepatan pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi dengan stiker dan surat edaran Menteri dalam Negeri No.441.7/1935.SJ tahun 2008 tentang percepatan pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dengan stiker.⁹

Melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dengan stiker yang ditempelkan di rumah ibu hamil, maka setiap ibu hamil akan tercatat, terdata dan terpantau secara tepat. Dengan data dalam stiker, suami, keluarga, kader, dukun, bersama bidan di desa dapat memantau secara intensif keadaan dan perkembangan kesehatan ibu hamil. Selain itu agar ibu hamil mendapatkan pelayanan yang sesuai standar pada saat antenatal, persalinan dan nifas sehingga proses persalinan sampai dengan nifas termasuk rujukannya dapat berjalan dengan aman dan selamat.⁹

Adapun manfaat Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir melalui peningkatan peran aktif keluarga dan masyarakat dalam

merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi dan tanda bahaya kebidanan.^{4,6,9}

Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2009 diperoleh cakupan PWS-KIA pada empat kabupaten/ kota yang memiliki angka kematian ibu tinggi, dapat dilihat dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Cakupan program KIA pada kabupaten/ kota yang memiliki kasus kematian tinggi di Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2009.

No	Cakupan Program KIA	Dinas Kesehatan Kabupaten/ kota			
		Kota Mataram	Lombok Barat	Lombok Tengah	Lombok Timur
1	K1 (95 %)	97,93	102,33	94,09	91,33
2	K4 (95 %)	92,12	91,78	83,41	83,78
3	Persalinan Nakes (90%)	86,86	86,71	78,16	77,60
4	Persalinan faskes	86,99	85,06	76,37	74,78
5	Pelayanan Nifas (90%)	85,51	89,24	84,29	79,52
6	KB aktif (85 %)	70,26	68,33	68,23	64,82

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Prop. Nusa Tenggara Barat,tahun 2009

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa kabupaten Lombok Timur memiliki cakupan KIA terendah dan masih berada dibawah standar pelayanan minimal (SPM 2015).

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah propinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 20 kecamatan dengan sarana dan prasarana yang tersedia adalah satu buah rumah sakit, 29 puskesmas, 111 polindes dan 1329 buah posyandu, Dimana 29 puskesmas telah melaksanakan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) . Dengan bidan sebagai implementor P4K sebanyak 234 orang yang penempatannya pada puskesmas dan polindes dan 29 orang bidan